

SPIRITUALITAS DAN ETIKA PEMBEBASAN DI INDONESIA

oleh

Soedjatmoko

Seminar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengenai
"Spiritualitas Dalam Masyarakat Modern"

Tugu, 23 ~~Agustus~~ 1989

Sept

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan untuk membahas masalah "Spiritualitas dan Etika Pembebasan" di forum ini. Untuk membicarakan masalah ini di depan saudara2, yang akan menjadi atau sudah menjadi pandu keimanan didalam pelayanan agama saudara-saudara, saya anggap suatu kehormatan besar

Selain daripada itu, memang masalah spiritualitas di zaman modern ini telah menjadi suatu masalah pokok, bukan saja di tanah air kita, melainkan di seluruh dunia. Seluruh umat manusia se-olah-oleh sedang mengalami suatu krisis, suatu keprihatinan mengenai keadaan manusia, masyarakat dan bumi kita ini. Jikalau dunia dan umat manusia sedang mengalami suatu peralihan, tidak jelas kemana arah tujuannya.

Ada yang melihatnya sebagai persimpangan jalan yang akhirnya menudju ke punahnya umat manusia dan hidup yang kita kenal sekarang, sebagai akibat perang atau peledakan nuklir, atau secara lebih lamban, karena umat manusia dicekek oleh kehancuran sistem-sistem penopang kehidupan lingkungan kita, akibat tindakan dan kelakuan umat manusia sendiri. Yang sudah mulai timbul ialah keyakinan umum di mana-mana di dunia ini, bahwa umat manusia menghadapi pilihan-pilihan pokok yang akan menentukan hidup matinya umat manusia, dan jikalau seandainya umat manusia dapat menyelematkan diri, sebagai manusia dan masyarakat macam apa umat manusia akan teruskan kehidupannya.

Persoalan-persoalan yang kita hadapi ternyata sangat kompleks, dan meliputi baik masyarakat negara2 industri maupun masyarakat negara2 berkembang, meskipun persoalan2nya berbeda2. Pengangguran struktural terutama bagi generasi muda di negara2 industri, kecenderungan memakai kekerasan dan pemakaian obat2 terlarang, serta pengangguran besar2an di negara2 berkembang pada umumnya, kemelaratan dan mundurnya tingkat ekonomi karena beban hutang luar negeri menghisap dana dari negara2 berkembang ke negara industri; juga alienasi (keterasingan) generasi muda dari sistem2 poliitk, apapun ideologinya di kebanyakan negara2 berkembang merupakan gejala yang sudah kita kenal semua. Belum lagi perubahan2 global yang sedang terjadi dan yang berdampak atas semua masyarakat di dunia ini, seperti globalisasi ekonomi2i nasional, munculnya

suatu lingkungan transnasional yang untuk sebagian besar menguasai akses kepada modal, teknologi canggih, ketrampilan tinggi, pasaran dan informasi. Dampak pengaruh revolusi komunikasi atas pola berusaha dan atas kebudayaan2 di dunia ini, sangat besar. Semua perubahan-perubahan ini tidak dapat dikuasai oleh negara atau pemerintah manapun juga. Perubahan2 semacam ini akan berjalan terus, didorong oleh perkembangan2 pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang se-olah2 tak terkendali lagi, dan telah merubah secara fundamental keadaan umat manusia

Untuk pertama kali di dalam kehidupan umat manusia dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan diri, dan sekarang dia berhadapan dengan masalah pemanasan bumi yang akan berubah pola cuaca dan pertanian di bumi ini dan akan mengakibatkan kenaikan permukaan laut, semuanya akibat tindak tanduk manusia sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kita sedang mengalami suatu "**mutation in the human condition**". Perubahan2 ini melampaui kemampuan ilmu2 ekonomi dan sosial untuk menerangkannya secara memadai. Juga ideologi2 besar yang sangat mendalam pengaruhnya di bagian pertama abad ke 20 ini, sekarang sudah apes, tidak mampu lagi memberi arah kepada aspirasi, pengertian dan tindakan kita, dan memang sudah jelas ketinggalan sejarah. Lebih lagi manusia sekarang dihadapkan dengan masalah2 besar dan baru yang belum pernah dialami umat manusia sebelumnya. Ketidak mampuan manusia untuk mengerti secara memadai apa yang sedang terjadi di dunia sekarang ini, dimana se-olah2 setiap kecenderungan yang dapat dilihat di pertentangan kecenderungan yang berlawanan. Keadaan bingung manusia sekarang ini pernah disebut oleh seorang pakar Perancis Edgard Pisani sebagai "**a crisis of intelligibility**". Dan makin mendalamlah dirasakan kehampaan spiritual kehidupan modern. Maka tidak mengherankanlah bahwa sekarang mulai tampak gejala orang banyak berpaling kembali ke agamanya masing2 untuk mencari pedoman dan pegangan dalam menghadapi masalah2 yang membingungkan itu.

II

Sampai dimanakah agama2 kita akan mampu memberi pedoman dan pegangan kepada manusia yang bingung itu dalam menghadapi perubahan2 pola kehidupannya yang mengacaukan itu dan terhadap ancaman keselamatan umat manusia dan generasi2 berikutnya?

Jawabannya tidak tentu.

Karena agama2 di dunia juga dirugikan akibat perceraian antara ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuanlah yang dalam waktu yang relatif singkat, telah memberi kepada manusia kekuatan yang sangat besar,

yang telah banyak membawa perbaikan untuk kehidupan manusia, akan tetapi yang juga merusak keseimbangan antara manusia dengan jati dirinya dan antara manusia dan lingkungan alamnya. Dan penambahan kekuatan manusia itu ternyata tidak dibarengi peningkatan kemampuan moral dan kearifannya. Kekuatan yang ada padanya dipakai manusia untuk keperluan perang dan untuk memenuhi keinginan materialis yang berlebihan. Dan dengan segala kemampuan yang ada pada manusia modern, ia toh gagal memakai kemampuan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok keseluruhan umat manusia, dan untuk menyusun suatu tatanan sosial sedunia untuk seluruh umat manusia yang adil dan makmur.

Sekarang ilmu pengetahuan sendiri telah mencapai pengertian bahwa manusia itu tidak lepas dari alam, dan bahwa dia ialah sebagian dari sistem alam dan sosial yang tidak dapat dia kuasai. Dia hanya dapat mengharapkan mempengaruhi sedikit banyaknya "the probabilities of outcomes" dari tindakan2nya.

Ilmu pengetahuan sekarang telah sampai pada pengertian juga bahwa ada pertanyaan2 yang telah ditimbulkannya sendiri, yang tidak dapat dijawabnya, karena sifat etis pertanyaan2 itu. Pertanyaan2 itu ialah mengenai arah-tujuannya ilmu itu sendiri, kemampuannya untuk menangani masalah moral pokok di dunia sekarang ini, tentang perang dan damai, tentang hidup dan mati, tentang pilihan2 baru yang sekarang terbuka bagi manusia, yang terletak misalnya di bidang bio-etika, dan di bidang pilihan teknologi, melihat dampak sosialnya dan dampak atas keseimbangan2 masyarakat. Persoalan2 yang terkandung didalam pilihan itu umumnya baru, karena baru timbul sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sering tidak ada patokan2 etis yang relevan di dalam tradisi budaya dan agama yang bersangkutan.

Maka dapat dikatakan bahwa zaman sekularisasi sudah mendekati akhirnya, dan pemimpin2 agama2 sekarang ditantang untuk memberi jawaban yang memadai.

III.

Inilah konteks permasalahan dalam mana agama2 kita menghadapi berbagai persoalan yang menyertai usaha pembangunan kita.

Apa sebabnya?

Sebab2nya agaknya bermacam2. Tapi jelas sudah bahwa dibalik kebanggaan yang kita rasakan kalau kita memandang hasil2 usaha pembangunan nasional kita, kita sadari juga bahwa sukses pembangunan kita juga telah

membawa masalah2 sendiri, baik yang berupa akibat sampingan, maupun masalah yang lebih pokok atau baru.

Jelaslah bahwa kemajuan yang telah dicapai itu, yang memang berhasil juga merubah wajah kemiskinan di negeri kita dan mengurangi jumlah golongan dibawah garis kemiskinan tertentu, juga telah membesar dan memperdalam kesenjangan atau jurang antara golongan kaya dan miskin, antara mereka yang , lepas dari pendidikan sekolah dasarnya, mempunyai akses kepada pengetahuan modern dan mereka yang tidak, dan antara mereka yang mempunyai pekerjaan tetap dan mereka yang nganggur.

Sulit bagi kita untuk menutup mata dan hati kita terhadap kebingungan, keprihatinan dan sering juga kemarahan para pemuda dan mahasiswa kita yang merasakan kesuraman masa depan mereka, dan ingin turut menentukan masa depan mereka sendiri. Sulit juga untuk melihat marginalisasi rakyat kecil, termasuk wanita2nya, dalam proses modernisasi masyarakat. Penggusuran2 kaki lima dan petani2 kecil karena keperluan2 riil, atau yang dianggap riil, sektor modern, pemakaian hukum modern untuk mengalahkan hak2 orang kecil berdasarkan adat dan kebiasaan, tanpa mempertimbangkan keadilan dalam arti yang sesungguhnya, semuanya ini merupakan manifestasi pemakaian kekuasaan sektor modern, atau elite modern, yang sering, tapi tidak selalu, tanpa pikiran, hanya berpegang kepada formalitas hukum dan efisiensi dalam mengejar kepentingannya sendiri.

Bukan saja di Indonesia, melainkan di hampir semua negara berkembang kita melihat timbulnya suatu golongan menengah yang menangani sektor ekonomi modern, dan yang "consumerist" orientasinya. Di negara2 yang jumlah penduduk besar golongan menengah ini cukup besar pula, sehingga golongan itu seolah2 sendiri hidupnya, tertutup dan terpisah dari kehidupan rakyat banyak dengan segala persoalan kemiskinannya. Teknologi komunikasi, yaitu TV, Video dan Satelit memudahkan perhatian, kepentingan dan hiburan golongan ini hanya berputar di sekitar dirinya sendiri sebagai golongan maupun secara pribadi, dan hubungan, perhatian dan solidaritas dengan manusia diluar lingkaran ajaib itu terputus. Bahkan sering kesamaan pola hidup dan kepentingan ekonomi dengan masyarakat2 industri lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat luasnya sendiri.

IV

Usaha pembangunan nasional memang bermaksud untuk memperbaiki kondisi material bangsa kita, akan tetapi kalau seorang anak sampai hati mencela ayahnya yang tidak sanggup membeli mobil baginya, sambil

berkata: "Siapa yang sekarang ini tidak kaya, ia bodoh" maka jelaslah bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Materialisme dan komersialisme yang berlebihan menunjukkan bahwa kerangka etika kita bersama, terlalu lemah untuk mempertahankan keseimbangan antara aspirasi manusia yang beraneka ragam itu.

Sebaliknya kita juga harus mengerti bahwa usaha pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan secara merata sekaligus antar-lapisan atau -golongan masyarakat, atau antara daerah masing-masing. Masalahnya memang bukan apakah ketimpangan itu dapat dihindari. Masalahnya ialah: adakah didalam masyarakat kekuatan moral, kepentingan materiil, dan komitmen kepada nilai-nilai pokok bangsa yang cukup kuat untuk senantiasa mengoreksi jurusan pembangunan, jikalau ketimpangan tertentu itu menjadi terlampau besar atau demikian mengeras sehingga kestabilan dan ketahanan sosial terancam?

.Mampukah masyarakat dan pemimpin informal, pemimpin agama, cendekiawan dan pemikirnya menguji keputusan para pakar ekonomi dan teknologi beserta konsekwensinya pada kaidah moral masyarakat itu? Dalam hal Indonesia tentu pada ketentuan Pancasila?

.Sampai dimanakah keputusan itu bakal mendekatkan kita kepada, atau menjauhkan kita dari, ketentuan Pancasila? Secara bagaimana suatu bangsa menentukan keseimbangan yang diinginkan antara kemajuan dan keadilan? Secara bagaimana suatu bangsa mengorganisasikan diri untuk membebaskan dan merangsang daya kreatif bangsa yang terpendam itu?

Jawaban atas pertanyaan semacam ini semua mempunyai dampak besar atas masalah pokok dalam pembangunan, yaitu kemiskinan dan keadilan. Dan masalah itu bukan masalah teknis saja, yang sebaiknya diserahkan kepada pakar saja. Pilihan teknologi dan pilihan pola berorganisasi itu pada hakekatnya merupakan pilihan budaya, pilihan yang akan turut menentukan bentuk dan sifat masyarakat yang di-idamkan. Artinya, terkandung disini berbagai masalah etis bagi masyarakat umum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan juga menimbulkan berbagai masalah etis yang baru, yang tidak ada ketentuan didalam tradisi kebudayaan atau agama yang bisa menjadi patokan.

Kita sedang mengalami perubahan besar dan pesat didalam masyarakat kita, dimana ketentuan dan nilai tradisional kelihatan tidak relevan lagi, sedang belum kelihatan juga ketentuan etis yang baru yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai pokok kebudayaan kita

Diantara permasalahan itu kiranya masalah kemiskinan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin merupakan suatu masalah moral yang pokok dalam segala usaha pembangunan di semua negara berkembang; suatu masalah struktural, warisan zaman feodal dan kolonial yang paling sulit diatasi.

Jelaslah sudah bahwa kemiskinan itu tidak hanya suatu masalah ekonomis, dan bahwa segala usaha ekonomis tidak akan membawa hasil yang mantap jikalau struktur sosial yang merupakan kerangka kemiskinan itu tidak dirubah. Dimensi struktural di semua negara berkembang ada sifat khasnya, karena sejarah yang berbeda. Akan tetapi pada hakekatnya persoalannya ialah secara bagaimana membebaskan golongan miskin di desa maupun di kota dari kekangan struktural ini, agar supaya dibebaskan daya kreatif dan inisiatif mereka itu sendiri.

Analisis yang melandasi kebijaksanaan pembebasan itu ternyata berbeda. Ada yang melandasi perjuangan kelas. Ada juga yang menolak konsepsi itu, dan melandasi peningkatan kemampuan berorganisasi golongan miskin itu sendiri dan pembukaan peluang politik untuk proses peningkatan kecerdasan dan belajar dari pengalaman bagi golongan miskin itu dalam berorganisasi sendiri ("self-organisation") untuk memikul tanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan langsung kepada anggota organisasinya. Memang proses itu memakan waktu yang agak lama dan memerlukan kesabaran dan napas yang panjang. Penindasan feodal dan kolonial yang demikian lama itu, telah mengajarkan kepada golongan lemah bahwa passivitas, sikap nrimo, merupakan siasat penyelamatan ("survival strategy") yang paling efektif. Dan senantiasa akan ada saja dorongan untuk mempercepat proses pembangunan dengan memaksakan wadah organisasi, lengkap dengan pimpinannya, dari luar. Akan tetapi pengalaman juga menunjukkan bahwa kesabaran dan ketekunan itu bisa membawa hasil yang baik. Dan sekali motivasi dan kesediaan berinisiatif itu terbangun, maka masalah alih-teknologi dan biaya menjadi jauh lebih mudah. Sebaliknya kegagalan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin membawa bahaya timbulnya ketegangan yang melampaui daya tahan sosial masyarakat ("social sustainability"). Cukuplah contoh anjloknya daya tahan sosial di berbagai negara di Amerika Tengah dan Selatan maupun di Asia, dan peningkatan kekerasan secara terus menerus dari kedua belah pihak. Akhirnya negara itu terpecah belah menurut garis pemisah suku, bahasa, agama atau ras. Memang salah satu pelajaran yang dapat ditarik dari usaha pembangunan di dunia dalam 40 tahun belakangan ini, ialah pentingnya supaya dalam usaha pembangunan dan dalam segala kemajuan yang dicapai, kesenjangan yang memang tidak dapat dielakkan, tidak melampaui batas toleransi ketidakadilan yang berlaku untuk kebudayaan politik yang bersangkutan. Transformasi masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan itu akan

7.

menghadapkan kita dengan begitu banyak masalah yang sulit sehingga kohesi sosial berdasarkan solidaritas sosial yang kuat, merupakan suatu syarat yang penting untuk mengatasi kesulitan2 yang mau tak mau kita hadapi. Belum lagi keterlibatan kita dengan dunia luar dengan segala gejolak ekonomi dan sosialnya., yang akan memerlukan kohesi sosial dan politik yang lebih besar lagi.

Usaha supaya kesenjangan2 yang menyertai usaha pembangunan tidak melampaui batas2 toleransi tadi. akan memerlukan dari pihak elite suatu negara berkembang kesediaan untuk menyederhanakan pola hidupnya, dan memberi baik peluang maupun komitmennya sendiri yang lebih besar pada pengembangan kemampuan golongan2 miskin dan sektor informal. Bahwa hal semacam itu merupakan suatu kebijaksanaan yang bermanfaat, barangkali sudah jelas. Akan tetapi yang barangkali lebih penting ialah bahwa masalah itu terutama merupakan suatu masalah etis, yang menyangkut nilai budaya pokok kita.

Sebenarnya sudah terlalu lama kita di dunia ketiga umumnya, tapi juga di negeri kita sendiri, serahkan usaha2 pembangunan masyarakat kita kepada para pakar di berbagai bidang, baik bidang pembangunan ekonomi, politik dan keamanan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfernya, sedangkan dimensi2 etis problema2 masyarakat kita di Dunia Ketiga kita amggap sebagai urusan belakang, yang baru perlu ditangani setelah para pakar mengambil keputusan2nya di bidang masing2. Distorsi dan gejolak2 politik, dan gejala "**stress**" yang dialami semua masyarakat berkembang menyarankan kepada kita bahwa barangkali sudah tiba waktunya kita mendahulukan identifikasi dan definisi permasalahan dari segi moral, sebelum kita tantang para pakar untuk memberi jawaban yang lebih baik atas tantangan tadi itu. Persoalan2 yang dihadapi masyarakat2 kita memang terlalu gawat untuk diserahkan kepada para pakar saja. Anjuran ini bukan suatu hal yang baru. Para pemimpin Gereja Katolik di Amerika Serikat telah berbuat demikian itu dengan studinya tentang perang nuklir dan tentang masalah kemiskinan dan ekonomi Amerika. Uskup Tinggi Gereja Anglikan di Inggris juga telah melontarkan tantangan semacam itu.

Memang, kalau didalam kebingungan orang banyak di dalam masyarakat2 kita, di tengah2 reruntuhan ideologi2 lama, orang mulai berpaling kembali kepada agamanya masing2, sedangkan para pemimpin agama tidak mampu memberi penerangan, pengertian dan pegangan kepada ummatnya, mereka mau lari kemana lagi?

Pertanyaannya bagi kita di Indonesia ini ialah: "Mampu dan siapkah para pemimpin agama untuk memegang peranan itu dan menekankan prioritas

dimensi moral dalam usaha pembangunan dan transformasi masyarakat itu, sesuai dengan patokan2 Pancasila?

Dilemma2 moral yang dihadapi manusia di dalam masyarakat2 yang sedang berkembang dan berubah dengan begitu pesatnya, dimana masalah2nya terkait dengan pilihan2 pada tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat golongan subnasional, nasional, internasional dan global, dan meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, memerlukan dari pemimpin agama pengetahuan yang akrab dengan bidang2 tadi itu, agar pertimbangannya relevan dalam melayani ummatnya. Ia harus mampu menyarikan dari kompleksitas permasalahan persoalan moral pokok yang tersembunyi di dalamnya. Dan dimana ketentuan2 etis tradisional tidak mencukupi, dia harus mampu mengajak orang untuk bersama menjalankan penalaran moral ("**moral reasoning**" atau **idjtihad**") sehingga ditemukan jawaban2nya. Dalam pada itu akan menjadi jelas juga bahwa suatu sikap moral tertentu tidak dapat diterjemahkan menjadi satu sikap atau tindakan politik tunggal. Akan menjadi jelas bahwa suatu sikap moral bisa, dan seharusnya dapat bermuara ke dalam lebih dari satu sikap atau kebijaksanaan dalam realitas politik sehari2. Maka yang dikemukakan sekarang ini bukan suatu anjuran kepada pemimpin2 agama untuk berpolitik, melainkan suatu pernyataan bahwa mereka mau tak mau turut bertanggung jawab untuk pengembangan kebudayaan politik dengan norma2 moral dan etisnya.

Selain perannya sebagai juru penerang mengenai soal2 moral pokok didalam masalah2 yang menyertai perubahan masyarakat dan pembaharuan diri suatu kebudayaan, mereka juga harus mampu menunjukkan kesinambungan jawaban masa kini atas persoalan2 moral yang baru dengan nilai dan kaidah2 moralitas agama dan budaya yang ada.

VI.

Akan tetapi, disamping keakraban dengan teknologi dan kehidupan modern umumnya, kemampuan re-interpretasi dan re-aktualisasi kaidah2 moral agama atau budayanya agar mendapat relevansi masakini, banyak akan tergantung juga dari kemampuannya untuk membebaskan diri dari kebiasaan2 dan interpretasi2 yang sudah membeku dan tidak relevan dalam membimbing kehidupan beragama dalam zaman modern.

Didalam sejarah agama2 besar berkali2 berulang kita lihat secara bagaimana agama, tatkala agama itu terbungkus berkulit keras dalam rutin dan pelaksanaan ritual,, dihidupkan dan disegarkan lagi dan diberi relevansi untuk situasi manusia masa itu oleh gelombang spiritualitas baru.

Gelombang2 semacam itu timbul pada waktu krisis2 besar di dalam sejarah, dimana manusia dihadapkan kembali pada pertanyaan pokok mengenai makna hakiki kehidupan manusia di bumi, dan dimana manusia terdorong

9

untuk mengadakan perjalanan batinnya mencari kediriannya yang essensial dan hubungannya dengan Tuhan. Perjalanan batiniah ini dapat membangkitkan kembali spiritualitasnya, yaitu keadaan kalbu yang memungkinkan manusia melihat dan memahami keajaiban keberadaan kita dalam kehidupan, serta kesatuan dan keindahan semua manifestasi ciptaan Tuhan ("**Iman**"). Spiritualitas ini adalah mata kalbu ("**ain al qalb**") yang, dengan ridha Allah, memahami Nur Illahi, dan membuat kita memandang dunia dan diri kita sendiri dalam cahaya sebenarnya. Spiritualitas inilah yang merupakan sumber sedalam2 dari kekuatan jiwa manusia dan kearifan, welas asihnya dan keterikatannya kepada kasih dan kebaikan ("**Ihsan**").

VII.

Namun, perlu juga kita sadari bahwa spiritualitas pada dirinya sendiri tidak akan mencukupi untuk memberikan kepada kita masing2 keihlasan dan kekuatan tekad untuk mengendalikan diri sedemikian rupa, sehingga dalam derap kemajuan pembangunan kita, golongan miskin dan lemah kita tidak tertinggal. Tetap diperlukan kerangka kebijaksanaan2 nasional yang dapat menyalurkan komitmen2 ini menjadi kebijaksanaan yang konkrit serta kelakuan pribadi yang menghormati dan membebaskan motivasi dan daya kreatif masyarakat luas kita. Konsepsi "manusia se-utuhnya" seperti disebut di dalam GBHN tiada mempunyai arti, kecuali sebagai keadaan bagi kemajuan manusia di bidang spiritual ("**Insan Kamil**")

Dalam hubungan yang lebih global, agaknya, sangat perlu, dan sudah tiba waktunya untuk mencoba mendamaikan dan mengintegrasikan kembali ilmu pengetahuan dan agama. Kemungkinan itu ada kiranya, karena ilmu pengetahuan pada dewasa ini menghadapi pertanyaan2 yang tidak dapat dijawabnya sendiri, dan agama2 sekarang terpaksa memperluas cakrawala tanggung jawab etisnya. Perdamaian itu agaknya tidak akan tercapai dengan jalan akal semata, tapi setidaknya2nya dialog sudah dimulai dan perlu diteruskan dan diperdalam. Perdamaian itu diperlukan ummat manusia dalam ikhtiarnya untuk menyelamatkan diri dan bumi yang kita huni ini. Didalam ikhtiar ini, maupun dalam usaha pembangunan nasional, masih ada suatu tanggung jawab lain yang harus diemban oleh agama2 kita. Yaitu, dengan segala perbedaan sekalipun, menjalin kerjasama dalam ikhtiar tadi itu dan dalam usaha pembangunan nasional, tapi juga dalam memupuk nilai2 pokok bersama kita, yaitu solidaritas manusia, hak2 azasi manusia dan martabat manusia. Inilah warisan kita bersama yang berakar pada kesadaran kita akan makna transenden kehidupan manusia dan pada hati nurani yang meliputi seluruh ummat manusia.